



Jenis Artikel: Artikel Penelitian

Analisis Dampak Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Iman Teguh, Rizki Indrawan*, Oktaviani Rita Puspasari, Dewanto Tribuana dan Ati Sumiati



AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

***KORESPONDENSI:**

rizki.indrawan@uniku.ac.id

DOI: [10.18196/rabin.v9i2.26766](https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.26766)

SITASI:

Teguh, I., Indrawan, R., Puspasari, O. R., Tribuana, D., & Sumiati, A. (2025). Analisis Dampak Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(2), 438-464.

PROSES ARTIKEL

Diterima:

24 Apr 2025

Reviu:

27 Jun 2025

Revisi:

06 Jul 2025

Diterbitkan:

28 Jul 2025



Abstrak

Latar Belakang: Saat ini, masih terbatasnya penelitian yang menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan model pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan menyelidiki dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia dan menyelidiki dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori dengan mengambil data dari semua pemerintah provinsi di Indonesia dengan data laporan keuangan yang digunakan mencakup lima tahun pelaporan (2018-2022). Analisis data panel digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Hasil Penelitian: Temuan penelitian ini adalah bahwa hanya satu dimensi yang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu dimensi fleksibilitas keuangan. Selain itu, terdapat dua dimensi yang memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari dimensi solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas tingkat layanan. Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengusulkan peninjauan kembali model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah di negara berkembang dan pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah menggunakan model pengukuran yang ditetapkan secara resmi oleh kementerian dalam negeri masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu lebih berfokus pada daerah tertentu saja. Penelitian ini menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan model pengukuran yang secara resmi ditetapkan oleh kementerian dalam negeri, sekaligus menguji dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah daerah provinsi di Indonesia dengan menggunakan data keuangan lima periode pelaporan.

Kata kunci: kesejahteraan masyarakat; kondisi keuangan; pemerintah daerah

Pendahuluan

Kesejahteraan Masyarakat berkaitan dengan mutu kondisi kehidupan yang diharapkan masyarakat dalam kehidupan bernegara (Amendola & Vecchi, 2022). Kesejahteraan masyarakat sangat relevan dengan pembangunan

manusia karena berpotensi memperoleh manfaat dari penerimaan barang dan jasa yang disediakan oleh negara (Howell & Sotomayor, 2023). Pada negara berkembang dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, kondisi kehidupan di suatu daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan dasar dan fasilitas bagi penduduknya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan hidup (Dung Tran & Dollery, 2023; Ritonga & Buanaputra, 2022). Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah dapat segera memenuhi seluruh kewajiban keuangannya tanpa mengabaikan mutu pelayanan dalam fungsi pelayanan publik (Nirwana dkk., 2023). Kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, kesejahteraan umum masyarakat di suatu daerah kemungkinan besar akan bergantung pada kondisi keuangan pemerintah daerah.

Kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor utama dalam unit-unit pembangunan pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Czupich, 2020). Kondisi keuangan pemerintah daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Hasil analisis kondisi keuangan pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi kompleksitas laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang efektif sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat luas (Ritonga, 2024). Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dalam berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU), Akan tetapi butuh keilmuan khusus untuk menganalisis berbagai informasi yang terkandung didalamnya. Sebagai contoh, dalam laporan posisi keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 terdapat akun kas di kas daerah senilai Rp. 6.370.414.210.348,85. Masyarakat umum mungkin akan melihat sebagai nilai tersebut sebagai nilai yang membanggakan karena pemerintah daerah tersebut memiliki kas di kas daerah yang sangat besar. Hasil analisis kondisi keuangan pemerintah daerah justru mengungkapkan makna yang sebaliknya. Salah satu contoh praktisnya ialah hasil pengukuran solvabilitas jangka pendek Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 menunjukkan nilai 5,84. Nilai 5,84 tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan kas di kas daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 kurang efektif karena nilai kas dan setara kas pemerintah daerah tersebut sebanyak hampir 6 kali dari kewajiban lancarnya. Seharusnya nilai kas di kas daerah tidak dibiarkan menumpuk dan lebih efektif jika digunakan untuk memaksimalkan pelayanan publik agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Beberapa hasil penelitian tentang kondisi keuangan pemerintah daerah di negara-negara maju dalam lima tahun terakhir sebagai berikut. Pertama, Kondisi keuangan pemerintah daerah berkorelasi positif signifikan terhadap indeks kebebasan ekonomi untuk kota-kota di Tennessee (Cochran & Childs, 2023). Kedua, Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah pada kota-kota besar di Polandia cenderung memiliki kemandirian keuangan yang baik dan membutuhkan investasi yang lebih besar di bidang infrastruktur dibanding pada segi teknis dan sosial (Czupich, 2020). Ketiga, solvabilitas anggaran terbukti berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan kota-kota kecil di Minas Gerais (Ferreira dkk., 2024). Keempat, berdasarkan hasil penelitian pada kota-kota madya di Polandia dan Portugal dapat dinyatakan bahwa kondisi keuangan sangat bervariasi tergantung ukuran kota madya, sehingga sulit untuk merumuskan kesimpulan mengenai hubungan antara aturan

fiskal dan kondisi keuangan kota madya (Malinowska-Misiąg, 2023). Kelima, kondisi keuangan pemerintah daerah bergantung pada tekanan fiskal yang diberlakukan oleh pemerintah negara bagian (Park dkk., 2022). Keenam, di Amerika Serikat, membayar pihak ketiga untuk menjalankan layanan publik dapat meningkatkan kondisi keuangan daerah terutama pada solvabilitas anggaran dan jangka panjang meskipun efektivitasnya bergantung pada tingkat penerapan layanan yang diserahkan ke pihak ketiga. Ketujuh, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Korea Selatan dapat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah (Shin & Kang, 2024). Kedelapan, lokasi geografis, pendapatan, pengeluaran, dan manajemen utang mempengaruhi kondisi keuangan daerah dan menentukan kemajuan daerah di Polandia (Skica dkk., 2020). Kesembilan, kondisi keuangan pemerintah daerah di wilayah metropolitan Mexico dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik (Trejo-Nieto, 2021). Begitu halnya kondisi keuangan di Tiongkok berhubungan kuat dengan kondisi sosial ekonomi di masing-masing daerahnya (Zhang dkk., 2024).

Di Indonesia, Beberapa hasil penelitian mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah ialah sebagai berikut. Pertama, Kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran dan kemiskinan (Habbe, 2021). Kedua, Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Nirwana dkk., 2023). Ketiga, Pengelompokan pemerintah daerah di Indonesia kedalam beberapa kluster dapat meningkatkan efektivitas analisis kondisi keuangan (Ritonga, 2024). Kelima, Kapasitas operasional, fleksibilitas keuangan, dan komitmen menjaga pelayanan publik dapat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah yang sehat di Indonesia (Ritonga & Buanaputra, 2022).

Sebagian besar literatur tentang pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah mengkaji kondisi keuangan pemerintah daerah dalam konteks negara maju. Akan tetapi, pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah di negara maju berbeda dengan negara berkembang. Hal ini disebabkan pemerintah daerah di negara berkembang sudah memiliki kemandirian finansial sehingga terhindar dari kesulitan keuangan (Alam dkk., 2017). Sebaliknya, pemerintah daerah di negara berkembang cenderung lebih mengutamakan transfer pendapatan dari pemerintah pusat dan kurang otonom (Chauvin dkk., 2017).

Sepanjang penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang mengkaji kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia dengan menggunakan Model pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Habbe (2021) menyatakan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji secara komprehensif pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengukuran tersebut dinilai memiliki kelemahan dalam hal karakteristik sampel. Kuantitas sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah 25 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Seharusnya, sampel yang digunakan didasarkan pada kesamaan karakteristik pemerintah daerah melalui mekanisme klusterisasi. Klusterisasi yang paling sederhana dalam hal ini ialah tidak mencampurkan pemerintah kabupaten dengan pemerintah kota dalam satu

klaster yang sama (Ritonga, 2024). Penelitian lain yang dilakukan oleh Nirwana dkk. (2023) yang difokuskan pada Kabupaten Enrekang dan tidak mengacu pada Model Pengukuran yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian ini adalah belum ada penelitian yang menggunakan model pengukuran kondisi keuangan yang tepat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sampel representatif pemerintah daerah di Indonesia untuk menguji dampak kondisi keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah, apakah kondisi keuangan pemerintah daerah berdampak pada kesejahteraan masyarakat? Urgensi penelitian ini setidaknya terbagi menjadi dua bagian yang dinilai dari beberapa sudut pandang. Pertama, penelitian yang mengukur kondisi keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan model pengukuran yang relevan sangatlah penting. Kedua, kesejahteraan masyarakat kemungkinan besar bergantung pada kondisi keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang menyelidiki dampak kondisi keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia dan menyelidiki dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur terkait pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengusulkan peninjauan kembali model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah.

Tinjauan Literatur dan Perumusan Hipotesis

Teori Permintaan dan Penawaran

Kondisi keuangan pemerintah daerah telah dijelaskan dengan kerangka permintaan dan penawaran. Teori ini permintaan dan penawaran menjelaskan kondisi keuangan apabila barang dan jasa yang digunakan pemerintah dalam keadaan normal. Sifat permintaan barang dan jasa adalah elastis, sehingga masyarakat akan memilih barang dan jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik (Ritonga dkk., 2019).

Teori permintaan dan penawaran adalah model fundamental dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang di pasar ditentukan melalui interaksi antara keinginan konsumen (permintaan) dan kemampuan produsen (penawaran). Dalam pasar yang kompetitif, harga suatu barang akan menyesuaikan hingga tercapai titik keseimbangan, yaitu saat jumlah yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen (Moberly, 2014; Nelson, 2013).

Elastisitas permintaan dan penawaran mengukur seberapa sensitif jumlah yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Jika permintaan elastis, perubahan harga kecil akan menyebabkan perubahan besar pada jumlah yang diminta. Faktor utama yang memengaruhi elastisitas adalah ketersediaan barang substitusi dan proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut (Dela Cruz dkk., 2023).

Teori permintaan dan penawaran tidak hanya digunakan untuk menentukan harga barang konsumsi, tetapi juga diaplikasikan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, dan kebijakan publik. Pemahaman elastisitas sangat penting bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi harga, memprediksi perilaku konsumen, dan merumuskan kebijakan ekonomi (Dela Cruz dkk., 2023; Zhuo dkk., 2024).

Teori permintaan dan penawaran sangat relevan dalam memahami kondisi keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan utang daerah. Interaksi antara permintaan (kebutuhan masyarakat dan belanja pemerintah) dan penawaran (sumber pendapatan, kredit, dan transfer) memengaruhi stabilitas serta kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dari sisi permintaan, Kebutuhan masyarakat akan layanan publik dan infrastruktur mendorong pemerintah daerah meningkatkan belanja dan, jika perlu, mencari pembiayaan tambahan seperti utang (Geng & Qian, 2024; Peng & Yi, 2024). Dari sisi penawaran, Sumber pendapatan (pajak, retribusi, transfer pusat) dan ketersediaan kredit dari bank atau pasar keuangan menentukan kemampuan pemerintah daerah memenuhi permintaan tersebut (Taylor dkk., 2021). Oleh karena itu, Ketidakseimbangan antara permintaan (belanja) dan penawaran (pendapatan/kredit) dapat menyebabkan defisit anggaran atau peningkatan utang daerah (Wen dkk., 2024; Westerlund dkk., 2011).

Studi di China menunjukkan ekspansi utang pemerintah daerah lebih banyak didorong oleh sisi penawaran (ketersediaan kredit dan kebutuhan investasi) daripada sisi permintaan, kecuali di wilayah tertentu. Ketidakseimbangan ini dapat mengancam stabilitas fiskal jika tidak dikelola dengan baik (Geng & Qian, 2024; Wen dkk., 2024). Pemerintah daerah dengan kondisi keuangan baik cenderung lebih responsif terhadap permintaan masyarakat, sedangkan daerah dengan kondisi fiskal lemah lebih bergantung pada sisi penawaran, seperti insentif atau ketersediaan dana dari luar (Peng & Yi, 2024; Taylor dkk., 2021). Pengurangan transfer dari pemerintah pusat mendorong daerah mencari sumber pendapatan baru atau inovasi pasar, namun daerah miskin lebih rentan terhadap penurunan layanan publik (Taylor dkk., 2021).

Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketersediaan sumber daya yang dimilikinya (Nirwana dkk., 2023). Masih banyak definisi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dari para peneliti terdahulu. Definisi kondisi keuangan pemerintah daerah yang paling banyak diterima adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu dan kemampuannya dalam menyelenggarakan pelayanan. (Dung Tran & Dollery,

2023; Ritonga & Buanaputra, 2022). Pengukuran kondisi keuangan pemerintah mengacu pada pengukuran kesehatan fiskal pemerintah (Gorina, 2023; Singla & Stone, 2018). Kesehatan fiskal pemerintah daerah dapat membantu dalam menentukan perencanaan dan penganggaran, serta rencana aksi yang realistis bagi kesejahteraan warga negara (Mamun & Chowdhury, 2022).

Kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan pembangunan manusia. Pembangunan manusia diukur menggunakan indeks komposit yang sering disebut indeks pembangunan manusia dan dirancang untuk mengukur kesejahteraan manusia (Mirahmadizadeh dkk., 2022; Morse, 2023). Indeks Pembangunan Manusia juga dinyatakan sebagai pengukuran kesejahteraan operasional oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diterbitkan setiap tahun dalam Laporan Pembangunan Manusia (Habbe, 2021). Konsep indeks pembangunan manusia mengukur tiga aspek penting, yaitu menjalani hidup panjang dan sehat, memiliki pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak (Liu dkk., 2023; Tripathi, 2021; Yin dkk., 2023).

Pengaruh Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat

Secara universal, tujuan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Dung Tran & Dollery, 2023; Ritonga & Buanaputra, 2022). Kesejahteraan masyarakat akan terwujud apabila pemerintah dapat menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kemampuan pemerintah dalam memenuhi pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakatnya dipengaruhi oleh kondisi keuangan pemerintah daerah (Ritonga & Buanaputra, 2022). Semakin baik kondisi keuangan pemerintah daerah, maka akan semakin mampu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin baik dan banyak pelayanan dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka akan semakin meningkat pula kualitas hidup masyarakat dalam hal umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, serta taraf hidup. Pada gilirannya, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Berdasarkan argumen di atas, hipotesis utama diajukan sebagai berikut:

H_a: Terdapat Pengaruh kondisi keuangan pemerintah daerah pada kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Solvabilitas Jangka Pendek terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Solvabilitas Jangka Pendek merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban lancar yang jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. Solvabilitas Jangka Pendek juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kas dan setara kas. Namun, nilai solvabilitas jangka pendek yang tinggi tidak selalu menunjukkan kondisi yang baik, karena dapat mengindikasikan adanya penumpukan kas yang tidak dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. (Ministry of Home Affairs, 2020; Nirwana dkk., 2023). Kas dan setara kas yang berlebihan akan lebih bermanfaat apabila digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan

kepada masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi nilai Solvabilitas Jangka Pendek maka semakin banyak kas yang disimpan dan tidak digunakan untuk pelayanan yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Fluktuasi keuangan jangka pendek meningkatkan depresi, kecemasan, dan menurunkan kesejahteraan psikologis (Nettle dkk., 2025). Tekanan solvabilitas jangka pendek menurunkan investasi jangka panjang dan kesejahteraan sosial (Smulowitz dkk., 2023). Selain dua temuan itu, keterbatasan likuiditas jangka pendek berdampak negatif pada pendapatan dan kesejahteraan pekerja (Giupponi & Landais, 2023). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H_{a1}: Solvabilitas Jangka Pendek berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaruh Solvabilitas Jangka Panjang terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Solvabilitas Jangka Panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas Jangka Panjang mencerminkan keberlanjutan pemerintah daerah karena dari sudut pandang akuntansi, kewajiban jangka panjang hanya dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah memiliki aset yang cukup yang dibiayai dari sumber daya yang dimilikinya (Nirwana dkk., 2023; Ministry of Home Affairs, 2020). Namun, semakin besar nilai Solvabilitas Jangka Panjang mencerminkan semakin besar pula kemampuan aset yang dimiliki pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Dengan demikian, semakin besar nilai Solvabilitas jangka panjang, maka pemerintah dapat secara berkelanjutan memberikan pelayanan yang optimal dan fasilitas yang memadai bagi masyarakat. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil temuan yang menyatakan bahwa Solvabilitas jangka panjang yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka panjang, yang mendukung peningkatan layanan publik dan fasilitas masyarakat secara berkelanjutan (Ritonga I, 2012). Dimensi solvabilitas jangka panjang menjadi indikator utama kesehatan keuangan daerah, yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik (Ritonga, 2014b). Tingkat solvabilitas jangka panjang yang lebih tinggi berkorelasi dengan kemampuan pemerintah daerah mempertahankan struktur fiskal sehat dan memenuhi kewajiban layanan publik (X. Wang & Cheng, 2023). Solvabilitas jangka panjang diperlukan agar pemerintah dapat terus mengakses kredit dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik (Oksanen, 2020). Dengan mengoptimalkan pelayanan dan fasilitas bagi masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H_{a2}: Solvabilitas Jangka Panjang berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kemandirian Keuangan menunjukkan kekebalan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya, baik dalam maupun luar negeri (Nirwana dkk., 2023; Ministry of Home Affairs, 2020). Semakin tinggi nilai kemandirian keuangan, semakin tinggi kemandirian keuangan yang dimiliki pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai Kemandirian Keuangan, semakin mudah bagi pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dan fasilitas bagi masyarakatnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali (Gunarta & Utama, 2022). Kemandirian keuangan daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (Khairudin dkk., 2018). Kemandirian keuangan daerah berdampak positif dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat (Arief dkk., 2018). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut.

H₀₃: Kemandirian Keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Fleksibilitas Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Fleksibilitas Keuangan merupakan kondisi di mana pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan keuangannya sebagai respons terhadap peningkatan komitmen melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang (Nirwana dkk., 2023; Ministry of Home Affairs, 2020). Ketika pemerintah daerah menunjukkan peningkatan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada masyarakatnya, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan keuangannya untuk memenuhi komitmen tersebut. Semakin baik fleksibilitas keuangan yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin baik pula komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Fleksibilitas keuangan yang optimal meningkatkan kinerja berkelanjutan, yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi (Sheng & An, 2024). Fleksibilitas keuangan juga memungkinkan organisasi mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan (An dkk., 2025). Selain itu, temuan lain juga menyatakan bahwa Fleksibilitas keuangan membantu organisasi beradaptasi dan berinovasi, mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang (Hao dkk., 2022). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ialah sebagai berikut.

H₀₄: Fleksibilitas Keuangan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaruh Solvabilitas Operasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Solvabilitas Operasional menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya operasional pemerintah dalam satu periode anggaran (Nirwana dkk., 2023; Ministry of Home Affairs, 2020). Solvabilitas operasional diukur dengan menggunakan total pendapatan dikurangi dana alokasi khusus dibagi dengan total biaya operasional. Semakin tinggi pendapatan yang dapat dikumpulkan pemerintah daerah untuk mendanai beban operasional pemerintah, maka semakin meningkat pula kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa yang digunakan untuk pelayanan. Peningkatan ini cenderung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan diini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa di Uganda, pendapatan pemerintah daerah menunjukkan korelasi positif yang signifikan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, di mana peningkatan pendapatan lokal mampu menjelaskan 62,4% variasi kesejahteraan masyarakat (Kadili & Gideon, 2023). Selain itu terdapat hubungan yang sangat kuat antara efektivitas pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah, dan peningkatan IPM, yang menandakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat (Hardana & Nasution, 2022). Selain itu, temuan lain menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap HDI dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Bakorwil 1 Madiun, Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi juga memediasi pengaruh positif PAD terhadap kesejahteraan masyarakat, menandakan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Wibisono dkk., 2024). Dengan demikian, hipotesis berikutnya yang diajukan ialah sebagai berikut:

H₀₅: Solvabilitas operasional berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Solvabilitas Layanan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Solvabilitas Layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat (Nirwana dkk., 2023; Ministry of Home Affairs, 2020). Solvabilitas Layanan sering diukur dengan menggunakan total aset tetap dibagi jumlah penduduk. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aset tetap berarti setiap individu di lingkungan pemerintah daerah mendapatkan alokasi pelayanan yang semakin optimal. Pelayanan yang optimal dari pemerintah daerah akan meningkatkan kesejahteraan. Pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian bahwa solvabilitas anggaran dan layanan terkait erat dengan kemampuan pemerintah daerah memenuhi permintaan layanan publik, yang mendukung pengelolaan keuangan sehat untuk kesejahteraan masyarakat (Bisogno dkk., 2019). Solvabilitas layanan (service solvency) pemerintah daerah juga terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress, yang berarti semakin baik solvabilitas layanan, semakin baik pula kondisi keuangan dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nashrullah & Khomsiyah, 2024). Selain itu, Solvabilitas layanan berpengaruh positif terhadap peluang terpilihnya kembali pejabat daerah, menandakan pentingnya

solvabilitas dalam menjaga kesejahteraan sosial masyarakat (Cuadrado-Ballesteros dkk., 2019a). Dengan demikian, hipotesis berikutnya yang diusulkan ialah sebagai berikut.

H₀₆: Solvabilitas Layanan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif yang menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti dan pengaruh kausalitas antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. (Farmer & Farmer, 2021; Jones & Goldring, 2021) Data yang dipilih dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah provinsi

Tabel 1 Sampel

No	Nama Pemerintah Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Provinsi Aceh	√	√	√	√	√
2	Provinsi Sumatera Utara	√	√	√	√	√
3	Provinsi Sumatera Barat	√	√	√	√	√
4	Provinsi Riau	√	√	√	√	√
5	Provinsi Jambi	√	√	√	√	√
6	Provinsi Sumatera Selatan	√	√	√	√	√
7	Provinsi Bengkulu	√	√	√	√	√
8	Provinsi Lampung	√	√	√	√	√
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	√	√	√	√	√
10	Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√	√	√
11	Provinsi DKI Jakarta	√	√	√	√	√
12	Provinsi Jawa Barat	√	√	√	√	√
13	Provinsi Jawa Tengah	√	√	√	√	√
14	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	√	√	√	√	√
15	Provinsi Jawa Timur	√	√	√	√	√
16	Provinsi Banten	√	√	√	√	√
17	Provinsi Bali	√	√	√	√	√
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	√	√	√	√	√
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	√	√	√	√	√
20	Provinsi Kalimantan Barat	√	√	√	√	√
21	Provinsi Kalimantan Tengah	√	√	√	√	√
22	Provinsi Kalimantan Utara	√	√	√	√	√
23	Provinsi Kalimantan Selatan	√	√	√	√	√
24	Provinsi Kalimantan Timur	√	√	√	√	√
25	Provinsi Sulawesi Utara	√	√	√	√	√
26	Provinsi Sulawesi Tengah	√	√	√	√	√
27	Provinsi Sulawesi Selatan	√	√	√	√	√
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	√	√	√	√	√
29	Provinsi Gorontalo	√	√	√	√	√
30	Provinsi Sulawesi Barat	√	√	√	√	√
31	Provinsi Maluku	√	√	√	√	√
32	Provinsi Maluku Utara	√	√	√	√	√
33	Provinsi Papua	√	√	√	√	√
34	Provinsi Papua Barat	√	√	√	√	√

di Indonesia yang berjumlah 34 pemerintah daerah per Desember 2024. Sampel ditentukan dengan menetapkan kriteria khusus yaitu pemerintah daerah provinsi yang telah memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun terakhir dan lima tahun berturut-turut yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Tabel 1 merupakan hasil pemilihan sampel yang telah dilakukan berdasarkan kriteria tersebut.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber. Pertama, data yang digunakan untuk mengukur variabel kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data tersebut diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing provinsi di Indonesia. Kedua, data yang digunakan untuk mengukur dimensi kondisi keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit (kecuali data kependudukan untuk salah satu indikator). Data ini diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama: bagian pertama menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah, dan bagian kedua menganalisis dampak kondisi keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Tahap pertama diuraikan sebagai berikut: (1) Penentuan klaster rujukan dalam hal ini menggunakan pemerintah provinsi seluruh Indonesia tahun anggaran 2018-2022 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. (2) Tabulasi data yang memuat informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit. Data tersebut sesuai dengan indikator dan dimensi yang digunakan untuk mengukur kondisi keuangan, ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Indikator Operasional

Nomor	Indikator	Formula
1	Kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2	Solvabilitas Jangka Pendek	$\frac{\text{Cash and cash equivalen} + \text{short term investation}}{\text{short term liability}}$
3	Solvabilitas Jangka Panjang	$\frac{\text{Total fixed assets}}{\text{Long term liability}}$
4	Kemandirian Keuangan	$\frac{\text{Total own souch revenue}}{\text{Total Revenue}}$
5	Fleksibilitas Keuangan	$\frac{(\text{Total Revenue} - \text{special allocation funds})}{(\text{Total liability} + \text{Employee Spending})}$
6	Solvabilitas Operasional	$\frac{(\text{Total Revenue LO} - \text{Special Allocations Funds LO})}{\text{Total Expences LO}}$
7	Solvabilitas Layanan	$\frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Total Populations}}$

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2020

Menghitung masing-masing indikator kondisi keuangan, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa satuan yang dihasilkan oleh masing-masing indikator tidaklah sama; misalnya, hasil pengukuran indikator solvabilitas jangka pendek menghasilkan satuan kali, sedangkan hasil pengukuran indikator solvabilitas tingkat layanan menghasilkan satuan rupiah per kapita.

Transformasi data untuk menghitung indikator solvabilitas jangka panjang, transformasi data diperlukan karena hasil perhitungan solvabilitas jangka panjang untuk setiap daerah sering kali menghasilkan nilai yang sangat berbeda pada tahun tertentu. Misalnya, di satu sisi, pada hasil perhitungan solvabilitas jangka panjang untuk pemerintah daerah yang tidak memiliki kewajiban jangka panjang pada tahun tersebut, penyebut yang digunakan adalah satu sehingga hasilnya dapat ditentukan. Dengan demikian, hasilnya adalah nilai aset tetap itu sendiri. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban jangka panjang pada tahun itu dan hasil perhitungannya adalah waktu. Dengan demikian, kami menggunakan logaritma natural untuk mengubah data.

Menghitung indeks indikator untuk menghasilkan nilai tinggi 1 dan nilai rendah 0, dalam acuan yang kita gunakan, satu dimensi menggunakan satu indikator, sehingga nilai setiap indeks indikator mewakili indeks dimensi. Hal ini juga dilakukan untuk menstandarisasi data nilai IPM. Hal ini meminimalkan kesenjangan nilai antara indeks dimensi pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah dengan IPM. Telah terbukti bahwa proses ini tidak mengubah esensi data atau memengaruhi hasil. Proses ini menggunakan rumus berikut:

$$\text{Indicator Index} = \frac{\text{actual value} - \text{minimum value}}{(\text{maximum value} - \text{minimum value})}$$

Ukur indeks kondisi keuangan dengan rumus berikut:

$$\text{Financial Condition Index} = \frac{\text{total dimension index}}{(\text{number of dimensions})}$$

Kemudian untuk analisis data panel antara masing-masing indeks dimensi pengukuran kondisi keuangan dengan IPM menggunakan *Eviews-13*.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Estimasi Model

Hasil estimasi model pada *Eviews-13* dilakukan mulai dengan mengestimasi *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) dengan hasil disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Estimasi *Common Effect Model* (CEM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0,466656	0,030856	15,12379	0,0000
IIFK	-0,210697	0,070854	-2,973664	0,0034
IIKK	0,169611	0,044951	4,117755	0,0001
IISJPKD	0,026307	0,070261	0,883607	0,3782
IISPJG	-0,052057	0,027611	-1,923784	0,3570
IISL	0,026805	0,074415	4,851969	0,0000
IISO	0,008611	0,046301	0,185982	0,8527
<i>R-squared</i>	0,296856		<i>Mean dependent var</i>	0,514470
<i>Adjusted R-squared</i>	0,270974		<i>S.D. dependent var</i>	0,181413
<i>S.E. of regression</i>	0,154896		<i>Akaike info criterion</i>	-0,851821
<i>Sum squared resid</i>	3,910823		<i>Schwarz criterion</i>	-0,722699
<i>Log likelihood</i>	79,40475		<i>Hannan-Quinn criter</i>	-0,799425
<i>F-statistic</i>	11,46933		<i>Durbin-Watson stat</i>	0,255485
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000			

Selanjutnya untuk hasil *Estimasi Fixed Effect Model* (FEM) ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* (FEM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0,540807	0,015345	35,24426	0,0000
IIFK	0,070153	0,017053	4,113764	0,0001
IIKK	0,002969	0,009467	0,313662	0,7543
IISJPKD	0,006178	0,015555	0,397147	0,6919
IISPJG	-0,002369	0,006909	-3,382544	0,0009
IISL	-0,433658	0,153518	-2,824805	0,0055
IISO	-0,009698	0,008011	-1,210508	0,2283
<i>Effect Specification</i>				
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
<i>R-squared</i>	0,985774		<i>Mean dependent var</i>	0,514470
<i>Adjusted R-squared</i>	0,981506		<i>S.D. dependent var</i>	0,181413
<i>S.E. of regression</i>	0,024671		<i>Akaike info criterion</i>	-4,364073
<i>Sum squared resid</i>	0,079124		<i>Schwarz criterion</i>	-3,626238
<i>Log likelihood</i>	410,9462		<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-4,064668
<i>F-statistic</i>	230,9787		<i>Durbin-Watson stat</i>	1,430197
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,000000			

Lebih lanjut, pada Tabel 5 akan menunjukkan hasil *estimasi random effect model* (REM).

Tabel 5 Hasil Estimasi *Random Effect Model* (REM)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	0,503376	0,027212	18,49865	0,0000
IIFK	0,068291	0,016931	4,033504	0,0001
IIKK	0,007281	0,009424	0,772634	0,4409
IISJPKD	0,000620	0,015456	0,040101	0,9681
IISPJG	-0,019325	0,006470	-2,846160	0,0050
IISL	0,005915	0,106470	0,055553	0,9558
IISO	-0,008362	0,008000	-1,045259	0,2975
<i>Effect Satisfaction</i>				
			S.D.	Rho
	<i>Cross-section random</i>		0,142765	0,9710
	<i>Idiosyncratic random</i>		0,024671	0,0290
<i>Weighted Statistics</i>				
<i>R-squared</i>	0,118589		<i>Mean dependent var</i>	0,039641
<i>Adjusted R-squared</i>	0,086145		<i>S.D. dependent var</i>	0,028101
<i>S.E. of regression</i>	0,026863		<i>Sum squared resid</i>	0,117625
<i>F-statistic</i>	3,655143		<i>Durbin-Watson stat</i>	0,926962
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,001973			

Hasil Uji Perbandingan Model

Berdasarkan hasil estimasi ketiga model tersebut, selanjutnya dilakukan perbandingan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, kami melakukan uji Chow untuk membandingkan model CEM dan model FEM. Kedua, kami melakukan uji Hausman untuk membandingkan model FEM dan model REM. Ketiga, kami melakukan uji LM untuk membandingkan model CEM dan model REM. Hasil ketiga uji perbandingan model tersebut disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6 Hasil Uji Perbandingan Model

Uji Hausman			
<i>Correlated Random Effects – Hausman Test</i>			
<i>Equation: Untitled</i>			
<i>Test Cross-section random effects</i>			
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	36,256708	6	0,0000
Uji Chow			
<i>Redundant Fixed Effects Tests</i>			
<i>Equation: Untitled</i>			
<i>Test cross-section fixed effects</i>			
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	190,771179	(33,130)	0,0000
<i>Cross-section Chi-square</i>	663,082846	33	0,0000
Uji LM			
<i>Time Hypothesis</i>			
	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	230,3679	9,499602	239,8675
	(0,0000)	(0,0021)	(0,0000)

Berdasarkan hasil uji Chow, nilai Probabilitas pada *Cross-section F* sebesar $< 0,05$ maka model yang lebih baik dalam hal ini ialah model FEM dibanding model CEM. Berdasarkan hasil uji Hausman, nilai Probabilitas pada *Cross-section random* sebesar $< 0,05$ maka model yang lebih baik dalam hal ini ialah model FEM dibanding model REM. Selain itu, berdasarkan hasil uji LM, nilai *Breusch-Pagan* $< 0,05$ maka model yang lebih baik dalam hal ini ialah model REM dibanding model CEM (Baltagi, 2005). Tabel 7 menunjukkan *summary* uji perbandingan model yang telah dilakukan

Tabel 7 *Summary* Uji Perbandingan Model

	CEM	FEM	REM	Keterangan
Chow		√		FEM
Housman		√		FEM
LM			√	REM

Hasil Uji Asumsi Klasik

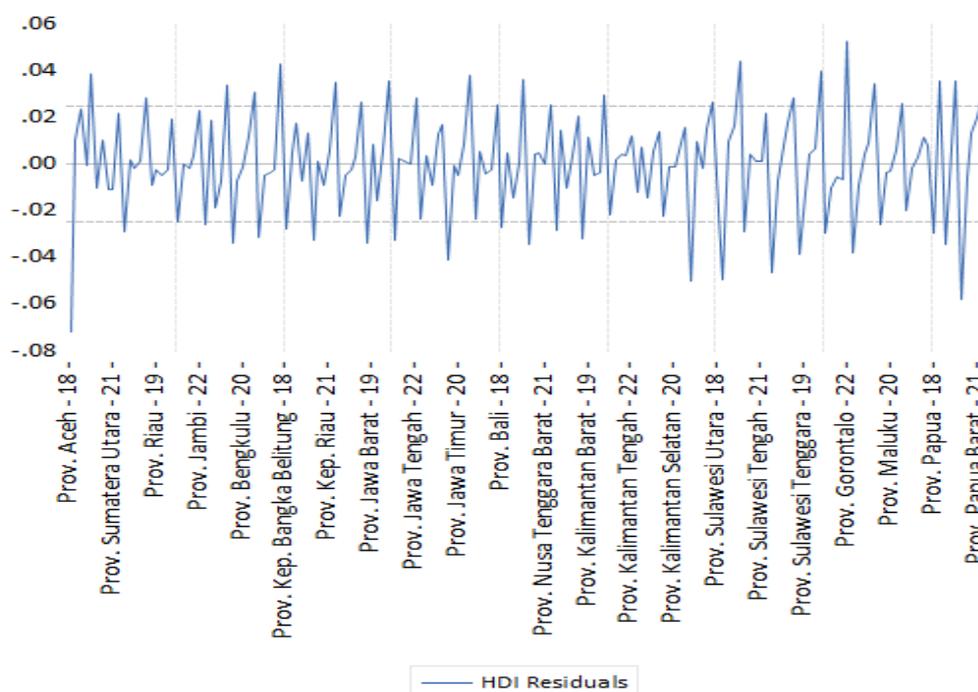
Berdasarkan hasil uji perbandingan model, model FEM terbukti lebih baik digunakan dalam penelitian ini. Model FEM tidak memerlukan prasyarat uji normalitas dalam uji asumsi klasik. Model FEM hanya membutuhkan uji Heteroskedastisitas dan uji

Multikolinearitas sehubungan dengan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu (Baltagi, 2005). Hasil uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas tersebut disajikan dalam Tabel 8 dan gambar 1.

Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas

	IIFK	IIKK	IISJPDK	IISJPJG	IISL	IISO
IIFK	1,000000	-0,198907	0,601236	0,101028	0,030526	0,144175
IIKK	-0,198907	1,000000	-0,164807	0,095531	0,145440	0,055991
IISJPDK	0,601236	-0,164807	1,000000	0,089606	0,070493	0,128065
IISJPJG	0,101028	0,095531	0,089606	1,000000	-0,192498	0,001550
IISL	0,030526	0,145440	0,070493	-0,192498	1,000000	0,134271
IISO	0,144175	0,055991	0,128065	0,001550	0,134271	1,000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai <0,85 sehingga seluruh variabel bebas dalam penelitian ini tidak terkena multikolinearitas (Baltagi, 2005).



Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas pada Gambar 1 menunjukkan bahwa nilainya ialah <500 dan >-500 sehingga tidak terkena heteroskedastisitas (Baltagi, 2005).

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis kami sajikan dalam Tabel 9. Sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Std.Eror	t-statistik	Prob.
C	0,540807	0,015345	35,24426	0,0000
Fleksibilitas Keuangan	0,070153	0,017053	4,113764	0,0001
Kemandirian Keuangan	0,002969	0,009467	0,313662	0,7543
Solvabilitas Jangka Pendek	0,006178	0,015555	0,397147	0,6919
Solvabilitas Jangka Panjang	-0,023369	0,006909	-3,382544	0,0009
Solvabilitas Layanan	-0,433658	0,153518	-2,824805	0,0055
Solvabilitas Operasional	-0,009698	0,008011	-1,210508	0,2283
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>				
R-Squared	0,985774	Mean dependent var		0,514470
Adjusted R-Squared	0,981506	S.D. dependent var		0,181413
S.E. of regression	0,024671	Akaike info croterion		-4,364073
Sum squared resid	0,079124	Schwaerz criterion		-3,626238
Log likelihood	410,9462	Hannan-Quinn criter		-4,064668
F-statistic	230,9787	Durbin-Watson stat		1,430197
Prob (F-statistic)	0,000000			

Berdasarkan data pada Tabel 9, Variabel fleksibilitas keuangan menunjukkan koefisien sebesar 0,070153 dengan nilai t-statistik 4,113764 dan p-value 0,0001, yang berarti variabel ini berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Nilai t-statistik yang tinggi serta p-value yang jauh di bawah 0,05 menunjukkan bahwa peningkatan fleksibilitas keuangan secara nyata mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Variabel kemandirian keuangan dengan koefisien yang dihasilkan 0,002969 dan t-statistik 0,313662, serta p-value sebesar 0,7543 mencerminkan pengaruh kemandirian keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat tidak signifikan secara statistik, meskipun arah koefisiennya positif. Selain itu, variabel solvabilitas jangka pendek memiliki koefisien sebesar 0,006178 dengan t-statistik 0,397147 dan p-value 0,6919 menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat tidak signifikan. Adapun variabel solvabilitas jangka panjang memiliki koefisien -0,023369 dengan t-statistik -3,382544 dan p-value 0,0009, menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, variabel solvabilitas layanan menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,433658 dengan t-statistik -2,824805 dan p-value 0,0055. Nilai ini menandakan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, variabel solvabilitas operasional memiliki koefisien sebesar -0,009698 dengan nilai t-statistik -1,210508 dan p-value sebesar 0,2283. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh solvabilitas operasional terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat negatif namun tidak signifikan secara statistik.

Selain itu, konstanta model atau variabel C (intersep) memiliki nilai koefisien sebesar 0,540807 dengan t-statistik yang sangat tinggi yaitu 35,24426 dan probabilitas 0,0000, menandakan bahwa nilai konstanta dalam model sangat signifikan. Ini berarti bahwa ketika semua variabel independen bernilai nol, nilai dasar dari variabel dependen masih cukup tinggi dan stabil. Signifikansi konstanta ini juga menunjukkan bahwa model memiliki baseline yang kuat dalam menjelaskan variabilitas kesejahteraan masyarakat.

Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,981506 dalam konteks model Fixed Effects ini memiliki arti bahwa model memiliki daya jelaskan yang sangat kuat dan efisien terhadap variasi variasi variabel dependen. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 98,15% variasi dari variabel dependen dalam model dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen. Angka ini mendekati 1, yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model sangat rendah dan sebagian besar fluktuasi variabel dependen berhasil dijelaskan oleh kombinasi variabel independen yang digunakan dalam model ini. Nilai Adjusted R-Squared dalam model ini mengindikasikan bahwa model memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sekaligus memastikan bahwa tidak ada banyak variabel bebas yang bersifat tidak relevan. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa model regresi panel *Fixed Effects* yang digunakan sangat tepat secara statistik dan ekonometrika (Baltagi, 2005; Gujarati & Porter, 2009).

Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Hasil pengukuran indeks kondisi keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 10. Berdasarkan data indeks kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2018–2022, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok antarprovinsi. Beberapa provinsi menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil dan tinggi, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, serta Papua, yang secara konsisten mencatat nilai di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, cenderung memiliki nilai rendah dan fluktuatif, menandakan tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, terdapat provinsi dengan perubahan yang sangat tajam dari tahun ke tahun, misalnya Jawa Barat dan Sumatera Utara, yang sempat mengalami penurunan signifikan. Secara umum, data ini mencerminkan bahwa kapasitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih belum merata, dengan kecenderungan provinsi di Jawa dan beberapa wilayah besar lainnya lebih unggul dibandingkan provinsi di kawasan timur.

Tabel 10 Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2018-2022

Pemerintahan Daerah	Indeks Kondisi Keuangan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Provinsi Aceh	7,17	9,12	13,83	14,02	11,67
Provinsi Sumatera Utara	9,77	10,01	7,89	3,53	8,54
Provinsi Sumatera Barat	4,35	4,18	7,42	3,91	6,80
Provinsi Riau	11,40	5,50	16,14	11,11	13,38
Provinsi Jambi	13,16	9,60	13,48	9,18	11,67
Provinsi Sumatera Selatan	10,28	9,48	9,72	3,62	12,88
Provinsi Bengkulu	5,63	4,87	10,72	9,08	10,94
Provinsi Lampung	4,68	4,83	9,47	3,90	12,13
Provinsi Kep. Bangka Belitung	9,77	9,35	12,47	4,25	6,71
Provinsi Kep. Riau	4,41	4,11	5,26	3,60	5,80
Provinsi DKI Jakarta	14,94	13,21	18,51	10,36	15,85
Provinsi Jawa Barat	14,75	14,63	12,62	5,10	9,55
Provinsi Jawa Tengah	18,60	12,08	16,36	19,28	15,13
Provinsi D.I. Yogyakarta	13,80	13,14	21,03	9,40	17,27
Provinsi Jawa Timur	8,23	8,27	14,28	7,83	11,52
Provinsi Banten	13,65	13,56	10,14	4,12	10,70
Provinsi Bali	13,19	13,44	10,98	3,78	7,37
Provinsi Nusa Tenggara Barat	9,58	10,16	13,33	2,35	5,51
Provinsi Nusa Tenggara Timur	8,48	9,29	6,56	7,31	3,97
Provinsi Kalimantan Barat	10,67	10,62	14,76	10,48	13,36
Provinsi Kalimantan Tengah	10,67	10,11	13,93	10,52	12,33
Provinsi Kalimantan Utara	3,95	10,89	14,68	13,07	13,61
Provinsi Kalimantan Selatan	7,20	8,58	14,20	5,81	16,16
Provinsi Kalimantan Timur	7,64	4,92	8,71	5,03	7,63
Provinsi Sulawesi Utara	9,98	8,72	6,12	2,33	4,06
Provinsi Sulawesi Tengah	10,06	9,39	14,25	10,41	11,07
Provinsi Sulawesi Selatan	5,09	5,28	7,71	2,58	5,84
Provinsi Sulawesi Tenggara	3,35	3,84	7,46	3,38	3,51
Provinsi Gorontalo	8,11	2,63	8,23	5,77	2,99
Provinsi Sulawesi Barat	2,70	2,57	6,45	3,32	4,12
Provinsi Maluku	1,92	2,18	7,43	2,49	3,54
Provinsi Maluku Utara	9,12	7,86	7,24	3,07	3,54
Provinsi Papua	13,09	14,01	18,23	16,16	13,90
Provinsi Papua Barat	14,39	14,39	13,77	14,81	12,09

Pembahasan

Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2018-2022

Hasil pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel 10, menunjukkan kondisi keuangan yang bervariasi. Hampir seluruh pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini menunjukkan kondisi keuangan yang fluktuatif dalam rentang waktu tertentu. Artinya, pemerintah daerah provinsi di Indonesia sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 belum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Selain inkonsistensi, sebagian besar pemerintah daerah menunjukkan penurunan kondisi keuangan pada tahun 2022. Penyebab terjadinya inkonsistensi dan penurunan tersebut

sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Selain itu, temuan ini membuktikan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda yang menyebabkan kondisi keuangan masing-masing pemerintah daerah juga berbeda-beda (Nirwana dkk., 2023; Ritonga, 2024).

Dampak Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah kami lakukan sebagaimana disajikan dalam Tabel 9, bahwa hanya satu dimensi pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah yaitu Fleksibilitas Keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tiga dimensi berikutnya yang terdiri dari kemandirian keuangan, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas operasional tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dua dimensi berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu Solvabilitas Jangka Panjang dan Solvabilitas Tingkat Layanan. Temuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pengaruh Solvabilitas Jangka Pendek terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis pertama yang diajukan adalah terdapat pengaruh negatif antara Solvabilitas Jangka Pendek terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Solvabilitas Jangka Pendek tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pada rentang tahun 2018-2022, pemerintah provinsi di Indonesia masih belum optimal dalam pengelolaan kas karena Solvabilitas Jangka Pendek digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan kas (Ritonga, 2014b). Pernyataan ini didasarkan pada nilai kas dan setara kasnya tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ketika menghadapi kewajiban lancar. Penyebab belum optimalnya pengelolaan kas tercermin dari hasil analisis solvabilitas jangka pendek yang menunjukkan bahwa kas yang tersedia di sebagian besar pemerintah daerah masih terlalu banyak. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang jangka pendek (short-term solvency) tidak relevan secara statistik terhadap kesejahteraan (Cuadrado-Ballesteros dkk., 2019b). Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan pernyataan sebelumnya bahwa Solvabilitas jangka pendek tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Nashrullah & Khomsiyah, 2024).

Pengaruh Solvabilitas Jangka Panjang terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis kedua yang diajukan adalah terdapat pengaruh positif antara Solvabilitas Jangka Panjang terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil temuan tersebut bertentangan dengan hipotesis yang diajukan bahwa solvabilitas jangka panjang berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang lebih mendalam terhadap data dimensi Solvabilitas Jangka Panjang, ditemukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia pada rentang tahun 2018-2022 memiliki kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo hampir di setiap tahun anggaran. Hal ini memperburuk kondisi keuangan pemerintah daerah (Ritonga dkk., 2019). Sebagian besar

pemerintah daerah harus menanggung kewajiban jangka panjang, padahal kewajiban tersebut disebabkan oleh upaya pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakatnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa skala utang pemerintah daerah yang berlebihan menimbulkan efek crowding-out pada ekonomi riil, yang berdampak negatif pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Z. Tang, 2022). Selain itu, peningkatan utang justru menurunkan kesejahteraan sosial (M. Wang, 2024). Menghadapi hal tersebut, pemerintah harus lebih memperhatikan Solvabilitas Jangka Panjang disamping mengoptimalkan pelayanan publik, karena masyarakat memiliki anggapan bahwa tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah akan tetap terjaga tanpa memperdulikan kondisi keuangan pemerintah daerah. (Park dkk., 2022; B. Tang, 2018). Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pemerintah daerah. Temuan ini menarik dan perlu dikaji lebih lanjut, salah satu caranya adalah dengan mengetahui perbedaan pengaruh antara pemerintah daerah yang memiliki kewajiban jangka panjang karena kesejahteraan masyarakat dengan pemerintah daerah yang tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki pemerintah daerah yang masih mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang relatif besar untuk menyediakan barang dan jasa dalam pelayanan publik yang disebabkan oleh total pendapatan yang belum memadai. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum mandiri secara keuangan. Hal ini sangat mempengaruhi nilai Kemandirian Keuangan karena semakin mandiri pemerintah daerah dalam aspek keuangan, maka seharusnya sumber daya keuangan yang dimiliki semakin memadai untuk menyediakan barang dan jasa publik, yang tentunya menjadi aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menyatakan bahwa Kemandirian Keuangan pada tahun 2018-2022 tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa perubahan positif kesejahteraan masyarakat lebih banyak bergantung pada dana transfer, bukan pada kemandirian keuangan daerah karena kemandirian keuangan pemerintah di Indonesia masih rendah (Allifia Azzahra dkk., 2024). Selain itu, terdapat hasil penelitian lain yang menyatakan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah (indikator kemandirian keuangan) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah (Honggara & Jamaluddin, 2024).

Pengaruh Fleksibilitas Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis keempat adalah adanya hubungan positif antara Fleksibilitas Keuangan dengan Kesejahteraan Masyarakat. Hipotesis ini dibuktikan dengan hasil temuan penelitian ini. Hasil temuan tersebut membuktikan bahwa kapasitas pemerintah daerah baik dalam meningkatkan komitmen melalui peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang, memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa total pendapatan yang dihimpun pemerintah daerah dapat dikelola secara efektif untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat setelah dikurangi dana alokasi khusus apabila dihadapkan dengan total kewajiban yang ditambah dengan belanja pegawai. Argumen ini sejalan dengan teori supply and demand bahwa dalam konteks penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat, dari sisi supply, pemerintah dituntut untuk menyediakan pelayanan dan fasilitas dasar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang dituntut melalui sisi demand untuk meningkatkan taraf kesejahteraan (Meng dkk., 2023). Temuan ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa Fleksibilitas keuangan yang optimal meningkatkan kinerja berkelanjutan, yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi (Sheng & An, 2024). Fleksibilitas keuangan juga memungkinkan organisasi mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan kinerja pembangunan berkelanjutan (An dkk., 2025). Selain itu, temuan lain juga menyatakan bahwa Fleksibilitas keuangan membantu organisasi beradaptasi dan berinovasi, mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang (Hao dkk., 2022).

Pengaruh Solvabilitas Operasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis kelima adalah adanya hubungan positif antara Solvabilitas Operasional dengan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara solvabilitas operasional dengan kesejahteraan masyarakat. Kami menganalisis data solvabilitas operasional dan memperoleh data yang menunjukkan bahwa hampir seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada periode 2018-2022 memiliki rasio solvabilitas operasional kurang dari satu. Artinya beban operasional yang ditanggung untuk memenuhi permintaan masyarakat lebih besar daripada kemampuan menghimpun pendapatan di luar dana alokasi khusus, yaitu dana yang dialokasikan untuk program prioritas nasional (Ministry of Finance, 2003). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti langsung bahwa solvabilitas operasional secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bisogno dkk., 2019; Nashrullah & Khomsiyah, 2024). Kondisi seperti ini kemungkinan besar menunjukkan bahwa inefisiensi yang disebabkan oleh pelayanan publik masih dilakukan secara monopoli. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah disarankan untuk bekerja sama dengan NPO untuk menyediakan barang dan jasa publik karena kondisi keuangan mereka cenderung belum memadai (Park dkk., 2022; B. Tang, 2018).

Pengaruh Solvabilitas Tingkat Layanan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hipotesis keenam adalah bahwa terdapat hubungan positif antara Solvabilitas Tingkat Layanan dan Kesejahteraan Publik. Temuan dalam penelitian ini berbanding terbalik; yaitu, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara solvabilitas tingkat layanan dan kesejahteraan publik. Kami melakukan telaah pustaka yang lebih mendalam terkait dengan temuan kami. Kami menemukan dua fakta utama yang menjadi dasar argumen kami. Pertama, kemungkinan indikator-indikator yang digunakan dalam regulasi yang kita rujuk bukanlah indikator yang paling konservatif karena sebelum diformalkan dalam regulasi, indikator yang digunakan lebih dari satu (lihat Ritonga, 2014b). Pernyataan ini

didukung oleh ketidakkonsistenan hasil pengukuran jika menggunakan indikator lain (lihat Ritonga, 2014a). Dengan demikian, pada penelitian selanjutnya diperlukan pengukuran dengan menggunakan indikator lain. Pengukuran ini penting karena tidak menutup kemungkinan regulasi tersebut perlu direvisi. Kedua, permasalahan kependudukan. Belum ada regulasi yang mempertimbangkan jumlah penduduk di Indonesia dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah (Ritonga & Buanaputra, 2022). Regulasi ini penting karena jumlah penduduk berhubungan negatif signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah yang artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah karena beban yang ditanggung untuk memenuhi permintaan masyarakat semakin tinggi (Ritonga dkk., 2019). Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa beberapa penelitian pada program pertanian di Ethiopia, misalnya, menemukan bahwa peningkatan aset per kapita tidak selalu diikuti peningkatan pendapatan atau konsumsi, sehingga dampak pada kesejahteraan bisa terbatas jika tidak didukung faktor lain seperti akses pasar dan program pendukung (Teka & Lee, 2020). Selain itu, hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa solvabilitas layanan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika investasi dilakukan secara efektif dan sesuai kebutuhan lokal. Namun, tanpa perencanaan dan pemanfaatan yang tepat, peningkatan aset tetap belum tentu berdampak signifikan pada kesejahteraan (Zhukov dkk., 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menyajikan data mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia pada kurun waktu 2018-2022 sangat bervariasi. Sebagian besar kondisi keuangan pemerintah daerah pada kurun waktu tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022. Selain itu, seluruh kondisi keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia belum menunjukkan konsistensi atau perbaikan yang konsisten. Berdasarkan analisis data panel yang kami lakukan, kami juga berhasil mengidentifikasi bahwa hanya satu indikator kondisi keuangan pemerintah daerah yang terbukti memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu indikator fleksibilitas keuangan. Dua indikator terbukti memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu indikator solvabilitas jangka panjang dan indikator solvabilitas tingkat layanan. Selain itu, indikator kemandirian keuangan, solvabilitas jangka pendek, dan solvabilitas operasional tidak memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini memberikan dua implikasi utama baik secara teoritis maupun praktis. Pertama, implikasi teoritis dari penelitian ini ialah mengisi kekosongan literatur terkait pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kedua, implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengusulkan peninjauan kembali model pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah.

Meskipun representatif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia, penelitian ini terbatas pada jenis pemerintah provinsi di Indonesia. Menurut hemat kami, selain pemerintah provinsi, jenis pemerintah kabupaten dan kota tidak dapat diuji secara bersamaan untuk mewakili satu negara karena perbedaan jenis pemerintahan. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan diskusi seluas-luasnya bagi peneliti lain apabila memiliki wawasan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum dilanjutkan dengan melakukan uji diferensial pada cluster referensi yang sama dengan penambahan kriteria tambahan yang dianggap perlu berdasarkan temuan yang kami peroleh. Hal ini karena tujuan penelitian kami dalam penelitian ini telah tercapai, meskipun hasilnya menambah keingintahuan kami untuk menghasilkan pengukuran yang lebih tepat tentang kondisi keuangan pemerintah daerah dengan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam studi berikutnya, kami sarankan melakukan uji diferensial pada klaster referensi yang sama dengan kriteria tambahan yang diperoleh dalam studi ini.

Daftar Pustaka

- Alam, M., Alam, M., & Hoque, A. (2017). Measuring Financial Condition of Urban Local Government: A Study of Municipalities in Bangladesh. *The Journal of Developing Areas*, 51(2), 71–83. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/measuring-financial-condition-urban-local/docview/1899775548/se-2>
- Allifia Azzahra, Armeliza, D., & Musyaffi, A. M. (2024). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Kontribusinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 313–330. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.06>
- Amendola, N., & Vecchi, G. (2022). Durable goods and welfare measurement. *Journal of Economic Surveys*, 36(4), 1179–1211. <https://doi.org/10.1111/joes.12480>
- An, Y., Sheng, X., Zhu, X., & Zhang, Q. (2025). The Role of Financial Flexibility in Sustainable Development Performance of SRDI Enterprises. *Journal of Systems Science and Systems Engineering*, 34(1), 78–101. <https://doi.org/10.1007/s11518-024-5628-6>
- Arief, S., Ujianto, & Mashudi, D. (2018). Sustainability Economic and Economic Growth: The Moderating Effect of Disparity Region and Income On Society Welfare. *International Journal of Research - Granthaalayah*, 6(5), 300–320. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i5.2018.1453>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). Wiley.
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Citro, F. (2019). Budgetary solvency of Italian local governments: an assessment. *International Journal of Public Sector Management*, 32(2), 122–141. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2017-0328>
- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2015). Drivers for the financial condition of local government: A comparative study between Italy and Spain. *Lex Localis*, 13(2), 161–184. [https://doi.org/10.4335/13.2.161-184\(2015\)](https://doi.org/10.4335/13.2.161-184(2015))
- Chauvin, J. P., Glaeser, E., Ma, Y., & Tobio, K. (2017). What is different about urbanization in rich and poor countries? Cities in Brazil, China, India and the United States. *Journal of Urban Economics*, 98, 17–49. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2016.05.003>
- Cochran, H. H., & Childs, B. D. (2023). Economic Freedom and the Fiscal Condition of Cities in Tennessee. *Atlantic Economic Journal*, 51(4), 315–317. <https://doi.org/10.1007/s11293-023-09781-w>

- Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., Citro, F., & Bisogno, M. (2019a). Does financial health influence the re-election of local governments? *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 31(3), 345–363. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0114>
- Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., Citro, F., & Bisogno, M. (2019b). Does financial health influence the re-election of local governments? *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 31(3), 345–363. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0114>
- Czupich, M. (2020). Local government financial condition – small towns versus large cities in Poland. *Lex Localis*, 18(4), 807–834. [https://doi.org/10.4335/18.3.807-834\(2020\)](https://doi.org/10.4335/18.3.807-834(2020))
- Dela Cruz, K., Hermosura, J. C., Vigonte, F., & Abante, M. V. (2023). Analyzing the Real-World Application of the Elasticity Theory of Demand and Supply and its Impact on Pricing Strategies, Consumer Behavior, and Policy Decisions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4447159>
- Dung Tran, C. T. T., & Dollery, B. (2023). Does financial sustainability affect local resident satisfaction? The case of the Victorian local government system. *Public Money and Management*, 43(4), 302–310. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1987629>
- Farmer, A. Y., & Farmer, G. L. (2021). *Research Methods for Social Work: A Problem-Based Approach*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071878873>
- Ferreira, H. L., Resende, L. L., Barbosa Neto, J. E., Cunha, J. V. A. da, & Avelino, B. C. (2024). Explanatory factors of the financial condition in the municipalities of Minas Gerais. *Revista Ambiente Contábil - Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte - ISSN 2176-9036*, 16(1). <https://doi.org/10.21680/2176-9036.2024v16n1ID34950>
- Geng, X., & Qian, M. (2024). Understanding the local government debt in China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 86, 102456. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2024.102456>
- Giupponi, G., & Landais, C. (2023). Subsidizing Labour Hoarding in Recessions: The Employment and Welfare Effects of Short-time Work. *The Review of Economic Studies*, 90(4), 1963–2005. <https://doi.org/10.1093/restud/rdac069>
- Gorina, E. (2023). Understanding Municipal Fiscal Health: A Model for Local Governments in the USA. *Public Administration Review*, 83(6), 1855–1856. <https://doi.org/10.1111/puar.13729>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Gunarta, N. A., & Utama, M. S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Struktur Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(3), 807. <https://doi.org/10.24843/EEP.2022.v11.i03.p01>
- Habbe, A. H. (2021). The exploration of effect of financial performance to the public welfare. *International Journal of Law and Management*, 63(5), 464–478. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2017-0222>
- Hao, Z., Zhang, X., & Wei, J. (2022). Research on the effect of enterprise financial flexibility on sustainable innovation. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(2), 100184. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100184>
- Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6452>
- Honggara, A., & Jamaluddin, J. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 2021. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v3i1.7343>
- Howell, P., & Sotomayor, M. (2023). Measurement Of Inequality-Adjusted Human Development At The Sub-National Level For The United States In 2015 And 2020. *Journal Of Economic Development*, 55(3). <https://www.proquest.com/scholarly->

- [journals/measurement-inequality-adjusted-human-development/docview/2890437861/se-2?accountid=13771](https://doi.org/10.4135/9781529682786)
- Jones, J. S., & Goldring, J. (2021). *Exploratory and Descriptive Statistics*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781529682786>
- Kadili, W., & Gideon, M. (2023). Local government revenue and economic welfare of the local community of kagulu in buyende district local government, Uganda. *African Multidisciplinary Journal of Development*, 12(3), 232–249. <https://doi.org/10.59568/AMJD-2023-12-3-19>
- Khairudin, K., Tarmizi, R., Indrayenti, I., Aminah, A., & Muhammad, K. (2018). Financial Performance of Local Government and Social Welfare: The Case in Indonesia. *The Journal of Social Sciences Research, Special Issue 5*, 1035–1039. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi5.1035.1039>
- Liu, C., Tu, J., & He, Y. (2023). Measurement of China's Human Development Index and Analysis of Its Influencing Factors from the Perspective of New Development Concept. *Social Indicators Research*, 167(1–3), 213–268. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03105-w>
- Malinowska-Misiąg, E. (2023). Fiscal Rules versus the Financial Condition of EU Local Government Units. *Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu*, 67(2), 71–80. <https://doi.org/10.15611/pn.2023.2.07>
- Mamun, T. M., & Chowdhury, S. (2022). Assessing fiscal health of local governments in Bangladesh: evidence from some south-western municipalities. *Public Administration and Policy*, 25(1), 50–63. <https://doi.org/10.1108/PAP-04-2021-0027>
- Meng, X., Ding, T., & Wang, H. (2023). Incentives for local government expenditures on people's livelihood: the role of high-speed rail. *Socio-Economic Planning Sciences*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101700>
- Mirahmadizadeh, A., Ghelichi-Ghojogh, M., Vali, M., Jokari, K., Ghaem, H., Hemmati, A., Jafari, F., Dehghani, S. S., Hassani, A. H., Jafari, A., & Rezaei, F. (2022). Correlation between human development index and its components with COVID-19 indices: a global level ecologic study. *BMC Public Health*, 22(1), 1549. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13698-5>
- Moberly, T. (2014). Supply and Demand. In *Virtual Economies* (pp. 57–82). The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9525.003.0005>
- Morse, S. (2023). Quality of Life, Well-Being and the Human Development Index: A Media Narrative for the Developed World? *Social Indicators Research*, 170(3), 1035–1058. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03230-6>
- Nashrullah, Moh. H., & Khomsiyah, K. (2024a). The Effect of Regional Financial Management on Financial Distress of Local Government in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(07), 1616–1628. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i07.1173>
- Nelson, R. R. (2013). Demand, supply, and their interaction on markets, as seen from the perspective of evolutionary economic theory. *Journal of Evolutionary Economics*, 23(1), 17–38. <https://doi.org/10.1007/s00191-012-0274-4>
- Nettle, D., Chevallier, C., de Courson, B., Johnson, E. A., Johnson, M. T., & Pickett, K. E. (2025). Short-term changes in financial situation have immediate mental health consequences: Implications for social policy. *Social Policy & Administration*, 59(2), 293–308. <https://doi.org/10.1111/spol.13065>
- Nirwana, Seseang, R. H., & Salsabila, A. (2023). Analysis of Regional Financial Conditions in Local Governments of Enrekang Regency, South Sulawesi Province, Indonesia. in *International Journal of Professional Business Review* (Vol. 8, Issue 3). AOS-Estrategia and Inovacao. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i3.1014>

- Oksanen, H. (2020). Sustainability and Solvency of Government Finances Under the Euro: Illustrations and Policy Options. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3642394>
- Park, J., Kwon, S. W., & Choi, D. (2022). Local Government Responses to State Fiscal Controls: The Effects of Fiscal Preemptions on the Methods of Local Service Delivery. *Public Performance and Management Review*, 45(6), 1371–1397. <https://doi.org/10.1080/15309576.2022.2092157>
- Peng, J., & Yi, H. (2024). Incentivizing recycling in local governments: the moderating role of fiscal conditions in the adoption of Pay-As-You-Throw recycling programs. *Chinese Public Administration Review*, 15(4), 241–252. <https://doi.org/10.1177/15396754241279412>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, 37 (2020).
- Ritonga I, C. C. W. G. (2012). Assessing financial condition of local government in Indonesia: an exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37–49.
- Ritonga, I. T. (2014a). Analysing Service-Level Solvency of Local Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia. *International Journal of Governmental Financial Management*, 26. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=bfbc98977f223e0a5d077bf2e6ace5bf15c3bf36>
- Ritonga, I. T. (2014b). Developing A Measure Of Local Government's Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164. <https://core.ac.uk/download/pdf/297708374.pdf>
- Ritonga, I. T. (2024). Eliminating the effects of external environmental factors to improve the analysis of local government financial condition: a study in Indonesia. *Public Money & Management*, 44(5), 358–365. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2202521>
- Ritonga, I. T., & Buanaputra, V. G. (2022). Developing rules of thumb for the financial conditions of city livability: a study of municipal governments in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2101327>
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2). <https://doi.org/10.18196/jai.2002114>
- Sheng, X., & An, Y. (2024). The nonlinear impact of financial flexibility on corporate sustainability: Empirical evidence from the Chinese manufacturing industry. *Heliyon*, 10(6), e27825. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e27825>
- Shin, G., & Kang, H. (2024). The What and Hows of Local Fiscal Condition in South Korea. *International Journal of Public Administration*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2403529>
- Singla, A., & Stone, S. B. (2018). Fiscal Decentralization and Financial Condition. *Government Review*, 50(2), 119–131. <https://doi.org/10.2307/48596702>
- Skica, T., Rodzinka, J., & Zaremba, U. (2020). The application of a synthetic measure in the assessment of the financial condition of LGUs in Poland using the TOPSIS method approach. *Economics & Sociology*, 13(4), 297–317. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2020/13-4/19>
- Smulowitz, S. J., Cossin, D., & Lu, H. (2023). Managerial Short-Termism and Corporate Social Performance: The Moderating Role of External Monitoring. *Journal of Business Ethics*, 188(4), 759–778. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05498-7>
- Tang, B. (2018). Neighborhood Aged Care and Local Governance in Urban China. *Source: The China Journal*, 79, 84–99. <https://doi.org/10.2307/26559351>

- Tang, Z. (2022). Local Government Debt, Financial Circle, and Sustainable Economic Development. *Sustainability*, 14(19), 11967. <https://doi.org/10.3390/su141911967>
- Taylor, L., Haynes, P., & Darking, M. (2021). English local government finance in transition: towards the ‘marketization of income.’ *Public Management Review*, 23(7), 1081–1106. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1743343>
- Teka, A., & Lee, S.-K. (2020). Do Agricultural Package Programs Improve the Welfare of Rural People? Evidence from Smallholder Farmers in Ethiopia. *Agriculture*, 10(5), 190. <https://doi.org/10.3390/agriculture10050190>
- Trejo-Nieto, A. (2021). The geography of financial condition in the Mexico City metropolitan area. *Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit*, 36(6), 487–504. <https://doi.org/10.1177/02690942211060478>
- Tripathi, S. (2021). How does urbanization affect the human development index? A cross-country analysis. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 5(3), 1053–1080. <https://doi.org/10.1007/s41685-021-00211-w>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17/2003 (2003).
- Wang, M. (2024). Local Debt and Social Welfare in China: Evidence from Zhejiang and Anhui. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 100(1), 20–27. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/100/20241106>
- Wang, X., & Cheng, J.-C. (2023). The Effect of Fiscal Decentralization on Municipal Fiscal Condition: An Empirical Study of Large American Cities. *State and Local Government Review*, 55(4), 288–302. <https://doi.org/10.1177/0160323X231181332>
- Wen, X., Li, W., & Shen, Z. (2024). Local government debt and corporate asset-debt maturity mismatches: Evidence from China. *China Economic Review*, 88, 102269. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2024.102269>
- Westerlund, J., Mahdavi, S., & Firoozi, F. (2011). The tax-spending nexus: Evidence from a panel of US state–local governments. *Economic Modelling*, 28(3), 885–890. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2010.10.016>
- Wibisono, N., Eko, S., & Nur, A. (2024). The Influence of Original Local Government Revenue and Capital Expenditures on Economic Growth and Community Welfare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(01), 1–14. <https://doi.org/10.22219/jep.v22i01.29035>
- Yin, R., Lepinteur, A., Clark, A. E., & D’Ambrosio, C. (2023). Life Satisfaction and the Human Development Index Across the World. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 54(2), 269–282. <https://doi.org/10.1177/00220221211044784>
- Zhang, P., Shi, Y., Chen, C., & Zhuge, A. (2024). Measuring and Benchmarking Fiscal Health: A Study of Chinese Provincial Governments. *International Journal of Public Administration*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2357116>
- Zhukov, R. A., Kozlova, N. O., Odinkova, D. V., & Plinskaya, M. A. (2022). The Impact of Investing in Fixed Assets on The Region Socioeconomic Development. *Scientific Works of the Free Economic Society of Russia*, 237(5), 136–150. <https://doi.org/10.38197/2072-2060-2022-237-5-136-150>
- Zhuo, Z., Chen, S., Yan, H., & He, Y. (2024). A new demand function graph: Analysis of retailer-to-individual customer product supply strategies under a non-essential demand pattern. *PLOS ONE*, 19(2), e0298381. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298381>